

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah Swt. Yang terbaik di antara semua makhlukNya. Pada diri manusialah terletak dimensi rohani dan jasmani sebagai bagian kesempurnaannya.¹ Islam telah menggariskan dengan sangat jelas bahwa fungsi manusia baik secara individu maupun secara kolektif dalam hidup dan kehidupannya adalah beribadah, dan muara yang dituju dari segala aktifitas dunia adalah kedamaian dunia akhirat. Firman Allah Swt yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS.Al-Jumu 'ah: 10).²

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa segala aktifitas manusia dalam kehidupan yang berhubungan dengan keduniaan haruslah diiringi dengan nilai-nilai ibadah sebagai bukti pengabdian hambanya kepada Tuhan Nya. Nilai sebuah kesejahteraan hidup manusia tidaklah terlepas dengan hubungan *muamalah*. Yang salah satunya berkenaan dengan perilaku berbisnis, sebab bisnis memiliki peranan penting bagi manusia untuk meningkatkan perekonomiannya baik secara individu,

¹ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 1.

² Bahtiar Surin, *Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an*, (Bandung: Fa. Sumatra, 1978), hlm. 278.

masyarakat maupun negara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bekerja dan memproduksi untuk menghasilkan dan mengolah materi merupakan pilar bagi kemakmuran dan pembangunan bumi. Manusia sebagai wakil (khalifah) Allah tidak bisa meninggalkan pesan ini. Bekerja dinilai sebagai kebaikan. Maka dalam hal ini Allah memberikan kepada seluruh umat-Nya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan bahwa Allah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk yang diciptakan-Nya.³

Salah satu bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto.⁴ Namun kenyataannya UKM di Indonesia khususnya di Kota Banjarmasin masih terhambat sejumlah persoalan, sehingga perdagangan produk UKM belum menunjukkan hasil maksimal. Keinginan UKM pasca memperoleh modal pembiayaan dari perbankan adalah keinginan untuk dibina dan dimonitoring, agar pembiayaan yang diperoleh tidak habis sia-sia tanpa ada perkembangan berarti terhadap usahanya.⁵

Didalam Misi Kota Banjarmasin tahun 2016-2021 salah satunya mencantumkan misi yang sebagaimana bunyinya “Mewujudkan kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan,

³Ahmad Ibrahim Abu Sim, Manajemen Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 8.

⁴Dani Danuar Tri U, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang”, (skripsi: Universitas Diponegoro, 2013), h. 2.

⁵ Soeharsono Sagir, Kapita Selektta Ekonomi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group,2009), h. 608.

perindustrian dan pelabuhan dengan memperhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya Banjar, kuliner Banjar, serta pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶ Selain menjalankan Misi Kota Banjarmasin yang merupakan tugas utama Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah (UKM) yaitu memberdayakan perekonomian masyarakat.

Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu dinas pemerintah yang ingin mewujudkan kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, usaha pengrajin sasirangan termasuk perdagangan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, karena pengrajin sasirangan merupakan pelestarian budaya Banjar yang mana sudah tercantum dalam salah satu misi kota Banjarmasin. Usaha kerajinan kain sasirangan ialah kegiatan proses dimana dilakukan mulai dari penyediaan bahan baku, proses melukis atau pembuatan pola, menjahit jelujur, pewarnaan, pembilasan, sampai dengan pemasaran. Kain sasirangan merupakan kain khas suku Banjar, kain sasirangan umumnya digunakan sebagai kain adat yang biasa digunakan pada acara-acara adat suku Banjar. Sasirangan berasal dari kata menyirang yang berarti menjelujur, karena dikerjakan dengan cara menjelujur kemudian diikat dengan tali dan selanjutnya dicelup, hingga kini sasirangan masih dibuat secara manual.⁷

⁶Misi kota Banjarmasin tahun 2016-2021.

⁷Wawancara langsung dengan pengrajin sasirangan, jalan Manarap Lama KM 8.200 (3 Januari 2018).

Kain sasirangan merupakan kain batik tradisional dari Banjarmasin yang sangat identik dengan corak warna warni berbentuk garis-garis vertikal yang memanjang dari bawah keatas. Istilah sasirangan sendiri berasal dari kata "sa" yang berarti "satu" dan "sirang" yang berarti "lajur atau jelujur". Kain sasirangan diperoleh dari proses pewarnaan menggunakan pewarna alam seperti jahe, air pohon pisang, dan daun pandan yang dilakukan dengan bahan perintang berupa tali, benang, atau sejenisnya dengan cara diikat atau dijelujur. Corak atau motif kain sasirangan ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah jenis benang atau bahan pengikat yang digunakan sebagai perintang.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kini penggunaan kain sasirangan tidak hanya terbatas untuk ritual adat suku Banjar saja, tetapi sudah meluas bahkan menjelma menjadi produk yang memiliki nilai jual cukup tinggi sebagai pakaian resmi, acara pesta, dan pernikahan, bahkan beberapa digunakan sebagai bahan baku perancangan busana kelas nasional.

Kesejahteraan pengrajin sasirangan harus diperhatikan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memberdayakan perekonomian pengrajin sasirangan, maka dari itu perlu adanya peranan pemerintah dalam upaya pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan. Karena jika tidak ada peranan pemerintah maka usaha para pengrajin sulit berkembang dan jika tidak berkembang mungkin para pengrajin sasirangan akan beralih keusaha lain dan kain sasirangan punah dari adat banjar.⁸ Peranan pemerintah Kota Banjarmasin yaitu khususnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai sejauh ini mengatakan bahwa

⁸ Wawancara langsung di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Banjarmasin jalan Pramuka komplek semanda (MAN 2) (3 Januari 2018)

mereka sudah melaksanakan tugas peran untuk pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah. Tugas peranan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah kota Banjarmasin yang sudah terlaksanakan untuk pengrajin sasirangan yang berjumlah 5 pengrajin sasirangan bertempat di jalan Manarap Lama KM. 8.200 RT. 008 RW. 002 Kecamatan Kertak Hanyar Kelurahan Manarap Lama, tetapi penulis hanya mengambil 4 pengrajin sasirangan dari 5 pengrajin sasirangan, karena 1 pengrajin sasirangan itu sendiri baru memulai usahanya kurang lebih 2 bulan dan beliau hanya menjual kain sasirangan yang mengambil ditempat lain untuk dijual kembali, sedangkan penulis meneliti pengrajin sasirangan yang membuat dari awal hingga penjualan bukan yang hanya menjual saja, jadi tugas dan fungsi pemerintah yaitu:

- a. Memberikan fasilitas tempat yang digunakan untuk pameran atau bazar secara gratis.
- b. Membina atau mengajarkan cara bagaimana meningkatkan penjualan secara langsung maupun dengan cara menggunakan sosial media dengan baik agar meningkatkan perekonomian para pengrajin itu sendiri.
- c. Membina atau mengajarkan cara bagaimana membuang limbah sasirangan agar tidak merusak lingkungan sekitar.
- d. Sedangkan dengan pinjaman uang Dinas Koperasi dan UKM tidak ada pemberian pinjaman uang akan tetapi Dinas Koperasi dan UKM

memberikan saran untuk peminjaman uang ditempat yang Dinas Koperasi dan UKM itu mengetahui segala halnya salah satunya dari bunganya.⁹

Peranan pemerintah kota Banjarmasin yang sudah begitu maksimal dirasakan para pengrajin sasirangan setelah para pengrajin sasirangan itu sendiri mengatakan bahwa peran pemerintah kota Banjarmasin khususnya Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang sudah memberikan fasilitas tempat untuk pameran atau bazar yang tidak dipungut biaya. Sedangkan membina atau mengajarkan cara bagaimana meningkatkan perekonomian dengan penjualan yang baik dan agar tidak membuang limbah sembarangan yang mana dikatakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin.¹⁰

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centered, participatory, empowering, and a sustainable*". Kemiskinan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, sebab hal ini hampir terjadi pada setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di kalangan masyarakat pada umumnya adalah masih rendahnya tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk, sebagai akibat dari kurangnya modal untuk menjalankan usaha. Kehadiran rentenir dan tingkat bunga yang relatif tinggi di kalangan masyarakat merupakan pertanda masih belum terpenuhinya kebutuhan kredit yang amat

⁹*Ibid.*

¹⁰Wawancara langsung dengan pengrajin sasirangan, jalan Manarap Lama KM 8.200 (3 Januari 2018).

besar dari masyarakat. Pemerintah berusaha memenuhi permintaan akan kredit ini dengan berbagai cara, namun program demi program yang dikembangkan nampaknya selalu menghadapi hambatan yang sama, yaitu belum cocoknya program dengan kebutuhan.

Syariat Islam mengajarkan umat manusia untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Swt berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. *Al-Maa'idah*:2).

Di antara hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar hubungan mereka dengan rakyat senantiasa terajut dengan baik ialah berlaku adil dan memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebab, semua itu adalah amanat yang kelak dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

“Setiap kalian adalah pemimpin, yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang penguasa yang memimpin manusia (rakyat) adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka.” (HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu)¹¹

Perekonomian yang adil dan merata adalah impian semua rakyat. Untuk menciptakan perekonomian yang seperti itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengatur. Tanpa campur tangan pemerintah, besar kemungkinan bila

¹¹HR. al-Bukhari no. 2554, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu.

perekonomian dalam negeri akan sangat timpang hanya karena tidak adanya pihak yang mengatur. Namun, pemerintah tidak hanya sekedar pengatur perekonomian namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi sangatlah vital karena tanpa campur tangan pemerintah, perekonomian negara bisa timpang karena dikuasai oleh beberapa kelompok saja.

Bisa dipastikan bahwa pengangguran yang terjadi akan membawa dampak pada aspek (sektor) lainnya. Aspek-aspek yang akan terkena langsung adalah kesehatan dan pendidikan, karenanya sebagian beban biaya pendidikan dan kesehatan harus ditanggung (bahkan merupakan kewajiban) pemerintah. Bila pengangguran tersebut berlangsung cukup lama, maka kemiskinan absolut bahkan kelaparan bisa terjadi. Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Pengrajin Sasirangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemerintah kota Banjarmasin terhadap pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan?
2. Bagaimana pengrajin sasirangan dalam mengupayakan peran pemerintah kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah ingin mengetahui:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah kota Banjarmasin dalam menjalankan peranannya terhadap pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan.
2. Cara pengrajin sasirangan dalam memaksimalkan peran pemerintah kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan informasi, pertimbangan dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait tentang bagaimana peranan pemerintah dalam pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan diantara usaha yang lain,

2. Acuan atau rujukan bagi khususnya bagi penulis yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini dan bagi siapa saja yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain, dan
3. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai khazanah perbendaharaan bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan.¹²
Peranan yang dimaksud di sini adalah keterlibatan/upaya pemerintah dalam pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan khususnya peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
2. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹³ Pemerintah yang dimaksud di sini adalah badan atau lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan perekonomian pengrajin

¹²W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 870.

¹³Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi III, h. 859.

sasirangan yaitu pemerintah kota Banjarmasin Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

3. Pemberdayaan adalah proses cara, perbuatan memberdayakan.¹⁴ Pemberdayaan yang dimaksud di sini adalah segala cara pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hakekatnya bertujuan untuk membantu/meningkatkan dalam hal perekonomian pengrajin sasirangan. dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri pengrajin sasirangan tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.
4. Perekonomian adalah tindakan (aturan atau cara) berekonomi.¹⁵ Perekonomian yang dimaksud disini adalah modal/pendapatan bagi pengrajin sasirangan sudah merasa berlebihan, cukup, atau kurang.
5. Pengrajin adalah perajin.¹⁶ Pengrajin yang maksud disini adalah seseorang yang melakukan atau yang mengerjakan kain sasirangan dari awal sampai menjadi sebuah kain yang sudah bercorak warna-warni.
6. Sasirangan adalah kain tradisional dari Banjarmasin, identik beraneka warna berbentuk garis-garis vertikal yang memanjang dari bawah keatas.

¹⁴ *Ibid*, h. 242.

¹⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 312.

¹⁶ *Ibid*, h. 939

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan Penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang telah penulis lakukan, khususnya berkaitan dengan masalah judul di atas, maka ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis teliti.

Pertama, Peran pemerintah dalam pemberdayakan pasar tradisional ditengah maraknya pasar modern (Studi pada Pasar Ulin Raya di Banjarbaru) oleh Hairianami (1101157352) tahun 2015 Jurusan Ekonomi Islam. Penelitian ini mengenai bagaimana peran yang dilakukan oleh pengelola pasar dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengelola pasar dalam pemberdayaan pasar tradisional Ulin Raya di tengah maraknya pasar modern. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah pusat perdagangan yang dilihat dari maraknya eksistensi pusat perbelanjaan modern seperti minimarket, supermarket, hypermarket, departement store, hingga mall.

Kedua, Peranan Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Barabai). Oleh Ahmad Nafi (1001160250) tahun 2014 Ekonomi Syariah. Penelitian ini mengenai bagaimana Bank Syariah Mandiri menjalankan peran pentingnya terhadap usaha kecil menengah di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dan usaha apa saja yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Barabai dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan terhadap usaha kecil menengah di kabupaten HST. Peranan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dapat dilihat pada produk mereka yang bernama Pembiayaan Warung Mikro Syariah.

Ketiga, Peranan Bank Syariah Cabang Banjarmasin Dalam meningkatkan Usaha Mikro Masyarakat Kota Banjarmasin. Oleh Jum'atul Alia (0501156835) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah. Ini meneliti tentang bagaimana peran dari Bank Syariah BRI cabang Banjarmasin khusus dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat kota Banjarmasin yang mana maksud dari penelitian ini adalah bagaimana cara Bank Syariah BRI Cabang Banjarmasin dalam memajukan usaha mikro di Kota Banjarmasin.

Keempat, Peran bank Indonesia provinsi Kalimantan Selatan terhadap pengembangan dan pemberdayaan rumah sasingan dikota Banjarmasin. Oleh Noor Aida (1101150116) tahun 2015 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pengembangan Rumah Sasirangan di Kota Banjarmasin dan hambatan/kendala yang dihadapi serta strategi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Pengembangan Rumah Sasirangan di Kota Banjarmasin

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari V (Lima) bab, dengan sistematika penulisan terdiri dari 5 bab. Bab 1 (Pertama) merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait permasalahan yang terjadi di lapangan, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan yang mengandung masalah tentang peranan pemerintah kota Banjarmasin terhadap pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan, pada tujuan penelitian yang

berisikan tentang penegasan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, signifikansi penelitian yakni harapan dari kegunaan hasil penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, definisi operasional berisikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian sehingga tidak terjadi penafsiran yang keliru dalam memahami maksud judul, kajian pustaka yang merupakan hasil penelusuran terhadap bahan pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan yakni penguraian secara sistematis tentang bagian-bagian yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan. Bab II (Kedua) merupakan landasan teoritis. Pada bab ini diuraikan tentang pengertian dan fungsi pemerintah, serta peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bab III (Ketiga) Metodologi penelitian. Pada bab ini diuraikan tentang argumentasi berkenaan dengan pendekatan atau metode yang digunakan, dimana dalam penelitian ini meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian. Bab IV (Keempat) Penyajian data dan analisis data. Bab ini terdiri dari gambaran umum penelitian, deskripsi penelitian dan analisis terhadap peranan pemerintah kota Banjarmasin terhadap pemberdayaan perekonomian pengrajin sasirangan. Bab V (Kelima) Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan, setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-

pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada akhir penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan.

